

**ANALISIS PENGARUH *ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE*, STRUKTUR *CORPORATE
GOVERNANCE*, DAN *EARNING MANAGEMENT*
TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**AGENG WIDHY ANUGRAH
NIM. C2C607008**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ageng Widhy Anugrah
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607008
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, DAN EARNING MANAGEMENT* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***
Dosen Pembimbing : Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 9 Mei 2011

Dosen Pembimbing,



Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si., Akt.

NIP. 19720421 200012 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ageng Widhy Anugrah

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607008

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH**

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE,

STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE,

DAN EARNING MANAGEMENT

TERHADAP PENGUNGKAPAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Mei 2011


Tim Penguji

1. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si., Akt.



(.....)

2. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt.



(.....)

3. Darsono, SE., MBA., Akt



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ageng Widhy Anugrah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh *Environmental Performance*, Struktur *Corporate Governance*, dan *Earning Management* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Mei 2011

Yang membuat pernyataan,



(Ageng Widhy Anugrah)

NIM: C2C607008

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of environmental performance, corporate governance structure, and earning management to corporate social responsibility disclosure with size corporate as control variables. Corporate governance mechanism was analyzed by independent commissioner and audit committee. The extent of CSR was measured used corporate social disclosure index (CSDI) based on Global Reporting Initiative (GRI) reporting standard items which were disclosed in companies annual report.

This research used samples from 48 PROPER companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX), by using purposive sampling which were published annual report and financial report among 2006-2008. The method of analysis of this research used multi regression.

The result of this research show that environmental performance had a positive significant effect to Corporate Social Responsibility disclosure. Meanwhile, independent commissioner, audit committee, earning management and size corporate had not significant effect to Corporate Social Responsibility disclosure

Key words: *Environmental Performance. Corporate Governance Structure, Earnings, Management, Corporate Social Responsibility Disclosure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kinerja lingkungan, struktur *corporate governance*, dan manajemen laba terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Struktur *corporate governance* dianalisis dengan komisararis independen dan komite audit. Luas pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI) berdasarkan item standar pelaporan *Global Reporting Initiative* (GRI) yang diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan sampel dari 48 perusahaan PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan *purposive sampling* yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan dari tahun 2006-2008. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, komisararis independen, komite audit, manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kata kunci : Kinerja Lingkungan, Struktur *Corporate Governance*, Manajemen Laba, Pengungkapan CSR.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, DAN EARNING MANAGEMENT TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*”** ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar membimbing, memberikan saran dan dukungan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi motivator dan inspirator bagi penulis.
3. Dr. H. Abdul Rahman SE, Msi., Akt. selaku Dosen Wali.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kedua orang tuaku terkasih dan tercinta. Terima kasih untuk kasih sayang, perhatian, nasihat, semangat, dan doa yang selalu diberikan untuk kesuksesan penulis.

6. Eyang putri. Terima kasih untuk dukungan dan doa yang selalu diberikan
7. Adikku Alith Fajar Muhammad. Terus lakukan yang terbaik untuk keberhasilan dan kebanggaan bagi orang tua.
8. Om Hanan, Om Agung, Tante Irma, Mas Argo, Dek Wildan, Budhe Das, Mbak Kris dan seluruh keluarga besar. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa.
9. Para sahabatku : Tito, Dhema, Trigu, Glifandi, Dwi, Pungki, Abhie, Della, Rida, Anggi, Tia, Sawitri, Jenia, Bunda Nyta, Nina, Oshin, Zizah, Desie, Himah, Kunthi, Intan. Terima kasih untuk kebersamaan, persahabatan, inspirasi, dan motivasi selama ini. Semoga kita bisa menggapai kesuksesan bersama.
10. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler II angkatan 2007 kelas A dan B. Terima kasih untuk kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan selama di bangku kuliah.
11. Teman-teman SMP dan SMAku yang memberikan inspirasi dan motivasi.
12. Tim KKN II Banyumanik 2010/ 2011.
13. Semua pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa yang kalian berikan.

Penulis memohon maaf sekiranya penyajian maupun pembahasan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bidang akuntansi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 9 Mei 2011

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

(Ageng Widhy Anugrah)

NIM: C2C607008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al Baqarah: 153)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(Q.S. Al – Insyirah : 6 – 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak dan Mamah tercinta

Adikku

Terima kasih untuk doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Legitimasi.....	13
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	14
2.1.3 Teori Agensi.....	16
2.1.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	19

2.1.4.1 Konsep dan Definisi Tanggung Jawab Sosial.....	19
2.1.4.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial ..	21
2.1.5 <i>Environmental Performance</i>	22
2.1.6 Struktur <i>Corporate Governance</i>	24
2.1.6.1 Dewan Komisaris Independen	27
2.1.6.2 Komite Audit.....	28
2.1.6 <i>Earning Management</i>	29
2.1.7 <i>Environmental Performance</i> dan Pengungkapan CSR	30
2.1.8 <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan CSR.....	30
2.1.9 <i>Earning Management</i> dan Pengungkapan CSR	31
2.1.10 Variabel Kontrol.....	32
2.1.11.1 <i>Size</i> Perusahaan.....	32
2.2 Penelitian terdahulu	33
2.3 Kerangka Pemikiran	41
2.4 Pengembangan Hipotesis	41
2.4.1 <i>Environmental Performance</i> dengan Pengungkapan CSR	41
2.4.2 Mekanisme CG dengan Pengungkapan CSR	43
2.4.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen.....	43
2.4.2.2 Jumlah Dewan Komite Audit	45
2.4.3 <i>Earning Management</i> dengan Pengungkapan CSR	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	49
3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)	49
3.1.1.1 Pengungkapan CSR	49

3.1.2	Variabel Bebas (Independen)	50
3.1.2.1	<i>Environmental Performance</i>	50
3.1.2.2	Struktur <i>Corporate Governance</i>	53
3.1.2.3	<i>Earning Management</i>	53
3.1.3	Variabel Kontrol	55
3.1.3.1	<i>Size</i> Perusahaan	55
3.2	Populasi dan Sampel.....	55
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	56
3.4	Metode Pengumpulan Data	56
3.5	Metode Analisis Data	57
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	57
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	57
3.5.2.1	Uji Multikolinearitas	57
3.5.2.2	Uji heteroskedastisitas.....	58
3.5.2.3	Uji Normalitas	58
3.5.2.4	Uji Autokorelasi	59
3.5.3	Uji Hipotesis	60
3.5.4	Persamaan Regresi Linier Berganda	60
3.5.5	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t)	61
3.5.6	Koefisien Determinasi	62
3.5.7	Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	64
4.1.1	Sampel Penelitian	64
4.1.2	Analisis Deskriptif	65

4.2 Hasil Analisis Data	68
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik	69
4.2.1.1 Uji Normalitas	69
4.2.1.2 Uji Multikolinearitas.....	70
4.2.1.3 Uji Heterokedastisitas	71
4.2.1.4 Uji Autokorelasi	73
4.2.2 Pengujian Hipotesis.....	74
4.2.3 Uji t.....	74
4.2.4 Koefisien Determinasi.....	76
4.2.5 Uji F.....	76
4.3 Interpretasi Hasil	77
4.3.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap CSR.....	77
4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap CSR.....	79
4.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap CSR	80
4.3.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap CSR.....	81
4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap CSR.....	82
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Simpulan.....	84
5.2 Keterbatasan.....	84
5.3 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Peringkat PROPER	23
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1	Kriteria Peringkat PROPER	51
Tabel 4.1	Perolehan Sampel Penelitian	65
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	66
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4.4	Uji Glejser	73
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Autokorelasi	74
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda	74
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	76
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Uji-F.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1	Uji Normalitas	70
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel Penelitian	92
Lampiran B Indeks Pengungkapan CSR Berdasarkan Indikator GRI.....	92
Lampiran C Daftar Pengungkapan CSR Tahun 2007-2009.....	98
Lampiran D Hasil Pengolahan Data dengan SPSS.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan sebuah lembaga yang dianggap dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Tersedianya lapangan pekerjaan, menurunnya tingkat pengangguran, dan meningkatnya pendapatan domestik bruto negara merupakan manfaat yang diperoleh dari adanya perusahaan. Seiring berjalannya waktu, masalah sosial dan lingkungan yang disebabkan perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai laba semakin besar dan sulit dikendalikan. Permasalahan seperti polusi, penyusutan sumber daya alam, limbah, keamanan produk yang tidak terjamin semakin dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* perusahaan menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya dan berupaya mengatasinya. Hal ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mencapai kepercayaan (*trust building*) antara masyarakat dan perusahaan, membentuk citra perusahaan yang lebih baik, dan sarana kontribusi sosial, ekonomi, lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Atas tuntutan tersebut maka perusahaan berusaha mengungkapkan bentuk pertanggungjawabannya terhadap sosial dalam bentuk laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gagasan tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah

bagaimana perusahaan memberi perhatian pada lingkungannya terhadap dampak yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan.

Corporate Social Responsibility merupakan praktik bisnis transparan yang didasarkan pada nilai-nilai etika, dengan memberikan perhatian pada karyawan, masyarakat, dan lingkungan, serta dirancang untuk melestarikan masyarakat secara umum dan juga para pemegang saham (Inawesnia, 2008). Menurut pendiri CSR Asia, Richard Welford, *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai :

Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.

Berdasarkan definisi di atas, *Corporate Social Responsibility* sebagai pertanggungjawaban sosial dan lingkungan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan melalui transparansi dan didasarkan pada nilai-nilai etika dengan memberi perhatian pada pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan harapan *stakeholder*.

Corporate Social Responsibility sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan

lingkungan (Daniri, 2008). Banyak perusahaan yang antusias mengungkapkan laporan tanggung jawab sosialnya karena didorong beberapa faktor diantaranya adalah dapat meningkatkan citra perusahaan, dapat membawa keberuntungan bagi perusahaan, dapat menjamin keberlangsungan, dan sarana perusahaan dalam berkontribusi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat di sekitar perusahaan untuk terlihat *legitimate* di kalangan *stakeholders*-nya.

Corporate Social Responsibility dapat digunakan perusahaan untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di kalangan *stakeholder*. Menurut Gray dkk (1995), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibilities* (CSR) merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan *stakeholders* dan disarankan bahwa CSRD merupakan jalan masuk dimana beberapa organisasi menggunakannya untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi.

Pemerintah Indonesia memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan CSR dengan menganjurkan praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*) sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut (Pasal 66 ayat 2c) mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perusahaan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam undang-undang tersebut (Pasal 1 ayat 3), *Corporate Social Responsibility* dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Praktik dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan konsekuensi logis dari struktur *good corporate governance*, yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007 dalam Waryanto, 2010). Pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia menyatakan salah satu tujuan diterapkannya pedoman ini adalah tanggung jawab sosial yaitu menjadi acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sektor perusahaan (KNKG, 2006).

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Dr Boediono (Republika, 2006) saat membuka konferensi CSR yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Links (IBL) pada 7-8 September 2006 di Jakarta, “CSR merupakan elemen prinsip dalam tata laksana kemasyarakatan yang baik. Bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah bagi para pemegang saham. Pada intinya, pelaku CSR sebaiknya tidak memisahkan aktivitas CSR dengan *Good Corporate Governance* karena keduanya merupakan satu continuum (kesatuan), dan bukan merupakan penyatuan dari beberapa bagian yang terpisahkan”. Murwaningsari (2009) menyatakan bahwa gagasan utama *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik adalah mewujudkan tanggung jawab sosial (CSR).

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilandasi oleh teori agensi, dilatarbelakangi adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai prinsipal) dengan pihak manajemen (sebagai agen) (Jensen dan Meckling, 1976). Pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh pemegang saham dan pengendalian oleh manajemen merupakan inti dari teori agensi.

Dalam teori agensi (*agency theory*), dijelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya

pemisahan kepemilikan dan pengendalian ini akan menimbulkan permasalahan yang disebut *agency conflict*. Hal ini disebabkan pihak prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang saling bertentangan (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Schipper (1989), kepentingan manajemen sebagai agen perusahaan menyebabkan terjadinya manipulasi laporan keuangan, misalnya praktik manajemen laba.

Perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba akan berdampak pada rendahnya kualitas laba perusahaan. Hal ini akan berdampak pada menurunnya *image* di kalangan *stakeholder* perusahaan. Pada kondisi ini, perusahaan perlu melakukan tindakan yang berguna untuk tetap menjaga hubungan dengan *stakeholder* perusahaan. Salah satunya yaitu dengan mengungkapkan laporan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Handajani dkk (2008). Penelitian tersebut berhasil menemukan pengaruh positif *earning management* yang diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Struktur *corporate governance* yang menggunakan proksi proporsi dewan direksi independen, kepemilikan institusional, dan komite audit menunjukkan hanya komite audit yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Berbeda dengan penelitian Handajani dkk (2008) yang hanya menggunakan variabel independen *Corporate Governance* dan *Earning Management*, penelitian ini menambahkan variabel *Environmental Performance*. Tambahan variabel ini berdasarkan pada penelitian Rakhimah dan Agustia (2009) yang meneliti pengaruh

Environmental Performance terhadap pengungkapan CSR. Penelitian tersebut menemukan bahwa kinerja lingkungan (*environmental performance*) perusahaan yang tergabung dalam PROPER berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungan dengan baik maka akan mengungkapkannya dalam laporan sosial perusahaan untuk memberikan bukti kontribusi sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang merupakan teori yang menjelaskan hubungan masyarakat dengan perusahaan dimana masyarakat memberikan apresiasi terhadap tindakan sosial yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya kinerja lingkungan yang baik dan pengungkapan laporan CSR diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan memasukkan variabel *environmental performance* yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh *external performance* perusahaan yang ditunjukkan dengan *environmental performance* terhadap laporan pengungkapan tanggung jawab sosial di samping *internal performance* yang ditunjukkan oleh struktur *corporate governance* dan *earning management*.

Pada saat ini dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan merupakan suatu hal yang harus segera diatasi. Permasalahan lingkungan semakin menjadi perhatian serius oleh para *stakeholder* perusahaan seperti konsumen, investor, pemerintah, maupun masyarakat. Perusahaan yang memberikan dampak

lingkungan yang buruk akan berakibat buruk pula terhadap kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di kalangan *stakeholder*. Oleh sebab itu, perusahaan harus mempunyai kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang baik guna menjaga *image* positif di kalangan *stakeholder* perusahaan. Semakin baik kinerja lingkungan perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya maka semakin besar pula pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan.

Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah menerapkan kebijakan kelestarian pada setiap periode. Pada Pelita ketujuh melalui TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, dinyatakan “Kebijakan sektor Lingkungan Hidup, antara lain, mengenai pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan” (GBHN, 1998).

Begitu juga Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 menyatakan 1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 2) setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, 3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penelitian Pflieger dkk (2005) dalam Ja’far dan Arifah (2006) menunjukkan

bahwa usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya adalah ketertarikan pemegang saham dan stakeholder terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab di mata masyarakat.

Penelitian ini mencoba mengkaji hubungan antara *environmental performance*, struktur *corporate governance*, dan *earning management* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dengan menggunakan data dari perusahaan publik yang terdaftar dalam PROPER pada tahun 2007-2009. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Handajani dkk (2008) adalah dengan memasukkan variabel *environmental performance* dan penggunaan sampel menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar dalam PROPER.

Penggunaan sampel menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar dalam PROPER adalah untuk mengetahui apakah perusahaan publik yang tergabung dalam PROPER dan mengungkapkan laporan CSR memperhatikan struktur *corporate governance* dan *earning management* di samping *environmental performance*. Struktur *corporate governance* diukur dengan menggunakan proporsi dewan direksi independen dan jumlah komite audit.

Dari uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE*, STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN *EARNING MANAGEMENT* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah dibahas diatas, maka perumusan masalah akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah Struktur *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah *Earning Management* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Environmental Performance* terhadap pengungkapan CSR
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *earning management* terhadap pengungkapan CSR

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama bagaimana *environmental performance*, struktur *corporate governance*, dan *earning management* mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk mengungkapkan praktik CSR dalam laporan tahunannya.
2. Bagi praktisi bisnis, memberikan pemahaman tentang pentingnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sehingga dapat menjadi masukan atas pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub – sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing – masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan ini yang menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil dari analisis data serta pembahasannya

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi merupakan teori yang memahami dan menjelaskan penyebab organisasi melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Teori Legitimasi dipandang sebagai teori *Perspective Orientation System* yaitu suatu entitas dipengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi komunitas dimana entitas itu melakukan kegiatannya (Inawesnia, 2008). Kebijakan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai suatu hal penting sehingga manajer dapat mempengaruhi persepsi pihak lain atau organisasi tersebut.

Teori Legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma masyarakat dimana mereka berada. Menurut Suchman (1995) dalam Inawesnia (2008), legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial.

Suchman (1995) dalam Barkemeyer (2007) memberikan definisi mengenai *organizational legitimacy* sebagai berikut :

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.

Lindblom (1994, hal 2) dalam Deegan (2002) mendefinisikan *legitimacy*

theory sebagai berikut :

“...sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan system nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada diantara kedua system nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. “

Perusahaan harus selalu mempedulikan keadaan lingkungan sekitarnya karena dengan kepedulian tersebut maka keberlangsungan dan keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk tetap menyelaraskan diri dengan norma-norma dalam masyarakat. Masyarakat akan selalu menilai kinerja lingkungan yang telah dilakukan perusahaan, sehingga aktivitas perusahaan yang mendapat monitoring oleh masyarakat harus diselaraskan. Dengan adanya kinerja lingkungan yang baik dan pengungkapan laporan CSR diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

2.1.2 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* mengakui bahwa terdapat sejumlah *stakeholder* dalam masyarakat yang berinteraksi dengan cara dinamis dan kompleks. Menurut Gray, Kouhay dan Adams(1994, p.53), dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Definisi *stakeholder* menurut Freeman (1984) dalam Moir (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Gray (1995) menyatakan bahwa :

Stakeholder theory is (typically) explicitly bourgeois in that the world is seen from the perspective of the management of the organization who are concerned strategically with the continued success of the company.

Menurut Januarti dan Apriyanti (2005), ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu :

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka,
2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan,

3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan,
4. LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut maka teori *stakeholder* dapat digunakan untuk memahami hubungan antara *environmental performance* dengan pengungkapan CSR. Tuntutan stakeholder pada perusahaan untuk tidak menciptakan permasalahan lingkungan membuat perusahaan lebih memperhatikan kinerja lingkungannya. Melalui adanya kinerja lingkungan yang baik maka mendorong perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas *corporate social responsibility* karena melalui pengungkapan ini para *stakeholder* dapat menilai kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh pernyataan Handayani (2010) yang menyatakan bahwa pengungkapan sosial dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*.

2.1.3 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen and Meckling, 1976). Dalam

hal ini, pihak yang disebut *principal* adalah pemegang saham atau investor sebagai pemilik perusahaan dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari teori agensi adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh investor dan pengendalian perusahaan oleh manajemen. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham ingin mengetahui semua informasi di perusahaan termasuk aktivitas manajemen yang dapat memberikan nilai positif. Salah satu tindakan manajemen yang dapat memberikan nilai positif yaitu dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan *image* perusahaan dan menunjukkan kontribusi sosial, ekonomi, dan lingkungan pada masyarakat sekitar.

Asumsi bahwa manajemen yang terlibat dalam perusahaan akan selalu memaksimalkan nilai perusahaan ternyata tidak selalu terpenuhi. Menurut Eisenhardt (1989), dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), *agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004 dalam Widiatmaja, 2010). Manajemen cenderung memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan pemilik perusahaan yang kemudian menimbulkan masalah agensi.

Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). *Agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya *residual loss* (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Jensen and Meckling (1976) biaya agensi terdiri dari :

1. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan *principal*.
3. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas *principal* maupun agen karena adanya hubungan agensi.

Menurut Ali (2002) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), manajer yang telah diberi wewenang untuk mengelola perusahaan bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal dan melaporkan tanggung jawabnya melalui media laporan keuangan. Atas kinerja manajer tersebut, kompensasi manajemen diberikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Maksimalisasi keuntungan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkadang tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya. Tindakan manajemen tersebut disebut dengan manajemen laba. Hal ini

diperkuat oleh pernyataan Ujiyantho (2007), dalam Widiatmaja (2010), yang menyatakan bahwa agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba perusahaan.

Untuk mengantisipasi tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen maka pemilik perusahaan menerapkan struktur *good corporate governance*. Menurut Nasution dan Setiawan (2007), *corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Perusahaan yang melaksanakan struktur *good corporate governance* sudah seharusnya memperhatikan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kedua kegiatan tersebut sama-sama bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham namun tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya (Zarkasyi, 2008 dalam Rustiarini, 2010). *Corporate governance* menyangkut tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama atas kegiatan ekonomi dan segala dampaknya, sedangkan CSR adalah kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan utama perusahaan (Rustiarini, 2010).

2.1.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.1.4.1 Konsep dan Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan tidak hanya menitikberatkan pada proses produksi dalam perusahaan tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan di luar perusahaan. Definisi *Corporate Social Responsibility* yang dikemukakan oleh bank dunia (2002) yaitu *Corporate Social Responsibility as “[t]he commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.”* (Nurkhin, 2009).

Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan Alyson Warhurst sebagai:

internalisation by the company of the social and environmental effects of its operations through proactive pollution prevention and social impact assessment so that harm is anticipated and avoided and benefits are optimized.

Berdasarkan definisi tersebut, CSR merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan operasinya melalui tindakan proaktif pencegahan pencemaran dan penilaian dampak sosial, sehingga dampak negatif dapat diantisipasi dan dihindari sementara dampak positif dapat dioptimumkan.

Sementara itu menurut pendiri CSR Asia, Richard Welford, CSR didefinisikan sebagai :

Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour

that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.

Definisi tersebut mengandung arti bahwa *Corporate Social Responsibility* sebagai pertanggungjawaban sosial dan lingkungan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan melalui transparansi dan didasarkan pada nilai-nilai etika dengan memberi perhatian pada pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan harapan *stakeholder*.

European Commission seperti dikutip Darwin (2008) dalam Nurkhin (2009) mendefinisikan CSR sebagai

a concept whereby companies integrate sosial and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.

Definisi CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) adalah sebagai berikut :

CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian CSR pada intinya adalah tanggung jawab perusahaan sebagai akibat dari keputusan bisnisnya yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungannya.

2.1.4.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan perlu mengungkapkan tanggung jawab sosialnya untuk memenuhi akuntabilitasnya terhadap publik. Pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi bermanfaat pada pihak yang membutuhkan. Surat keputusan BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996, menyebutkan bahwa pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Kedua adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Penjelasan mengenai *corporate social responsibility* yang menjelaskan kontribusi perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya dapat ditemukan pada *voluntary disclosure*.

CSR disclosure oleh Gray dkk, (2001) dalam Rakhiemah dan Agustia (2009) didefinisikan sebagai suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial. Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

2.1.5 Environmental Performance

Menurut Suratno dkk (2006), *Environmental performance* adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Dengan kata lain, *Environmental performance* merupakan kinerja perusahaan yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha untuk melestarikan lingkungannya. *Environmental performance* dibuat dalam bentuk peringkat oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup. PROPER yang merupakan program pemeringkatan lingkungan dari Kementrian Lingkungan hidup. Penggunaan warna di dalam penilaian PROPER merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat, mulai dari yang terbaik , EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, sampai ke yang terburuk, HITAM. Secara sederhana masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan melihat peringkat warna yang ada.

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat PROPER

No	Peringkat	Keterangan
1.	Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3 R (Reuse, Recycle, Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat jangka panjang.
2.	Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).
3.	Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
4.	Biru minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5.	Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6.	Merah minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7.	Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Sumber : Laporan PROPER periode 2008 – 2009

2.1.6 Struktur *Corporate Governance*

Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya (Trisnaningsih, 2007). Definisi *Corporate Governance* menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in

Indonesia) dalam publikasi yang pertamanya menggunakan definisi Cadbury Committee adalah :

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (*FCGI*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, *corporate governance* merupakan sistem yang dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR (Nurkhin, 2009).

Pada prinsipnya tujuan *Corporate Governance* adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang berkepentingan.

Pemahaman atas *good governance* adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (*good corporate governance*) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik/ pemerintahan (*good government/ governance*). Pemahaman *good governance* merupakan perwujudan terhadap sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan

guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut Darmawati (2003) dalam Widiatmaja (2010), terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam *corporate governance*. Yang pertama adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu, dan yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) memaparkan azas-azas GCG sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibility (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.6.1 Dewan Komisaris Independen

Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahannya dan pengawasan dewan komisaris. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian tertinggi yang bertanggung jawab terhadap *monitoring* aktivitas *top management*. Menurut KNKG (2006) anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris yang terafiliasi (*non independent*) adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Menurut KNKG (2006), pemilihan komisaris independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui komite nominasi dan remunerasi.

2.1.6.2 Komite Audit

Dewan komisaris dapat membentuk komite yang berfungsi untuk menunjang tugas dari dewan komisaris. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan (KNKG, 2006).

Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-103/MBU/2002, pengertian komite audit adalah suatu badan yang berada di bawah komisaris yang beranggotakan minimal satu orang anggota komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan anggota BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas. Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

2.1.7 Earning Management

Earning management merupakan tindakan yang dilakukan pihak manajemen untuk memanipulasi laporan keuangannya. Menurut Schipper (1989), dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Tujuan manajemen melakukan manajemen laba didorong oleh beberapa faktor diantaranya yaitu untuk menarik investor, rencana bonus, motivasi politik, motivasi perpajakan dsb.

Healy dan Wahlen (dalam Xie, 2001) mendefinisikan manajemen laba :

“ . . . when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholder about the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”

Pengertian di atas mengandung beberapa aspek. Pertama, manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgment* (penilaian) seperti umur ekonomis dan nilai residu, pajak yang ditangguhkan, dan lain-lain. Kedua, adapun tujuan manajemen melakukan manajemen laba adalah untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Pengujian manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan suatu cara untuk mengurai pelaporan laba

yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual.

2.1.8. *Environmental Performance* dan Pengungkapan CSR

Kepedulian terhadap lingkungan harus selalu dilakukan oleh perusahaan sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan kinerja lingkungan sebaik mungkin. Perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungan dengan baik maka akan mengungkapkannya dalam laporan sosial perusahaan untuk memberikan bukti kontribusi sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang merupakan teori yang menjelaskan hubungan masyarakat dengan perusahaan dimana masyarakat memberikan apresiasi terhadap tindakan sosial yang dilakukan perusahaan. Menurut Suchman (1995), dalam Inawesnia (2008), legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial.

2.1.9. *Corporate Governance* dan Pengungkapan CSR

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada

kerangka peraturan (Widiatmaja, 2010). Pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia menyatakan salah satu tujuan diterapkannya pedoman ini adalah tanggung jawab sosial yaitu menjadi acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sektor perusahaan (KNKG, 2006).

Pada prinsipnya, tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut memerlukan akuntabilitas perusahaan dalam bentuk pengungkapan termasuk pengungkapan sosial. Struktur *corporate governance* dapat dilakukan perusahaan dengan membentuk komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen dan komite audit yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan aktivitas perusahaan diharapkan dapat memperluas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* melalui *monitoring* yang dilakukannya.

2.1.10 *Earning Management* dan Pengungkapan CSR

Pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen yang dijelaskan oleh teori agensi cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen. Agen atau manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Oleh

sebab itu, manajemen mempunyai tanggung jawab untuk mengungkapkan segala informasi kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disajikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Richardson dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), hal ini disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetric*).

Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earning management*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (pemegang saham) (Waryanto, 2010).

Tindakan manajemen laba akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas laba perusahaan. Kualitas laba yang rendah akan berdampak pada menurunnya *image* perusahaan di kalangan *stakeholder*. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk tetap menjaga hubungan dengan *stakeholder* perusahaan.

2.1.11 Variabel Kontrol

2.1.11.1 Size Perusahaan

Penelitian mengenai pengungkapan sosial dengan menggunakan variabel size perusahaan telah banyak dilakukan. Hal ini didasarkan pada teori agensi yaitu perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Menurut Sembiring (2005), perusahaan besar merupakan emiten yang

banyak disoroti sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Sembiring (2003) menguji pengaruh kinerja keuangan, *political visibility*, ketergantungan pada hutang terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan (*size*), tingkat *leverage*, profitabilitas, umur perusahaan, dan *earning per share*. Hasil dari penelitian ini adalah variabel ukuran perusahaan (*size*) sebagai salah satu proksi *political visibility* yang terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada alpha 5%.

Penelitian oleh Sembiring (2005) yang merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya menguji pengaruh ukuran perusahaan (*size*), tingkat *leverage*, profitabilitas, umur perusahaan, dan *earning per share* variabel *profile* dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*size*), tingkat *leverage*, profitabilitas umur perusahaan, dan *earning per share* variabel *profile* dan ukuran dewan komisaris. Hasil dari penelitian ini adalah

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR
2. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR
3. Earning per share berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

4. Profil perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR
5. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Penelitian yang dilakukan oleh Handajani dkk (2008) menguji pengaruh *earning management* dan struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan variabel *earning management* yang diukur dengan *discretionary accrual*, proporsi dewan direksi independen, kepemilikan institusional, komite audit sebagai proksi struktur *corporate governance* dan profil perusahaan, tipe industri, *leverage* sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar dalam BEI pada periode 2005-2007. Hasil dari penelitian ini adalah :

1. *Earning management* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan.
2. Komite audit yang menjadi proksi *corporate governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
3. Profil perusahaan dan Tipe industri sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian oleh Novita dan Djakman (2008) mengaitkan struktur kepemilikan (kepemilikan asing dan kepemilikan institusional) dengan variabel kontrol tipe industri, ukuran perusahaan, dan kategori BUMN-Non BUMN terhadap luas

pengungkapan tanggung jawab sosial. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan asing, kepemilikan institusional, tipe industri, ukuran perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian oleh Nurkhin (2009) menguji pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Variabel dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan komposisi dewan komisaris independen sebagai proksi *corporate governance* dan profitabilitas serta ukuran perusahaan dan tipe industri sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Komposisi dewan komisaris independen dengan proksi persentase jumlah dewan komisaris independen terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Profitabilitas dengan proksi ROE terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara tipe industri tidak terbukti.

Penelitian oleh Rakhiemah dan Agustia (2009) menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap *CSR disclosure* dan kinerja finansial. Sampel penelitian

menggunakan perusahaan publik yang tergabung dalam PROPER pada tahun 2004-2006. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan perusahaan yang tergabung dalam PROPER berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Pengarang dan Tahun Publikasi	Tujuan Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
Sembiring (2003)	Memberikan bukti empiris pengaruh kinerja keuangan, <i>political visibility</i> , ketergantungan pada hutang terhadap pengungkapan CSR	ukuran perusahaan (<i>size</i>), tingkat <i>leverage</i> , profitabilitas, umur perusahaan, dan <i>earning per share</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan (<i>size</i>) sebagai salah satu proksi <i>political visibility</i> yang terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan

			tanggung jawab sosial perusahaan pada alpha 5%
Sembiring (2005)	Memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan (<i>size</i>), tingkat <i>leverage</i> , profitabilitas, umur perusahaan, dan <i>earning per share</i> variabel <i>profile</i> dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.	ukuran perusahaan (<i>size</i>), tingkat <i>leverage</i> , profitabilitas, umur perusahaan, dan <i>earning per share</i> variabel <i>profile</i> dan ukuran dewan komisaris	ukuran perusahaan (<i>size</i>), umur perusahaan, dan <i>earning per share</i> variabel <i>profile</i> dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan

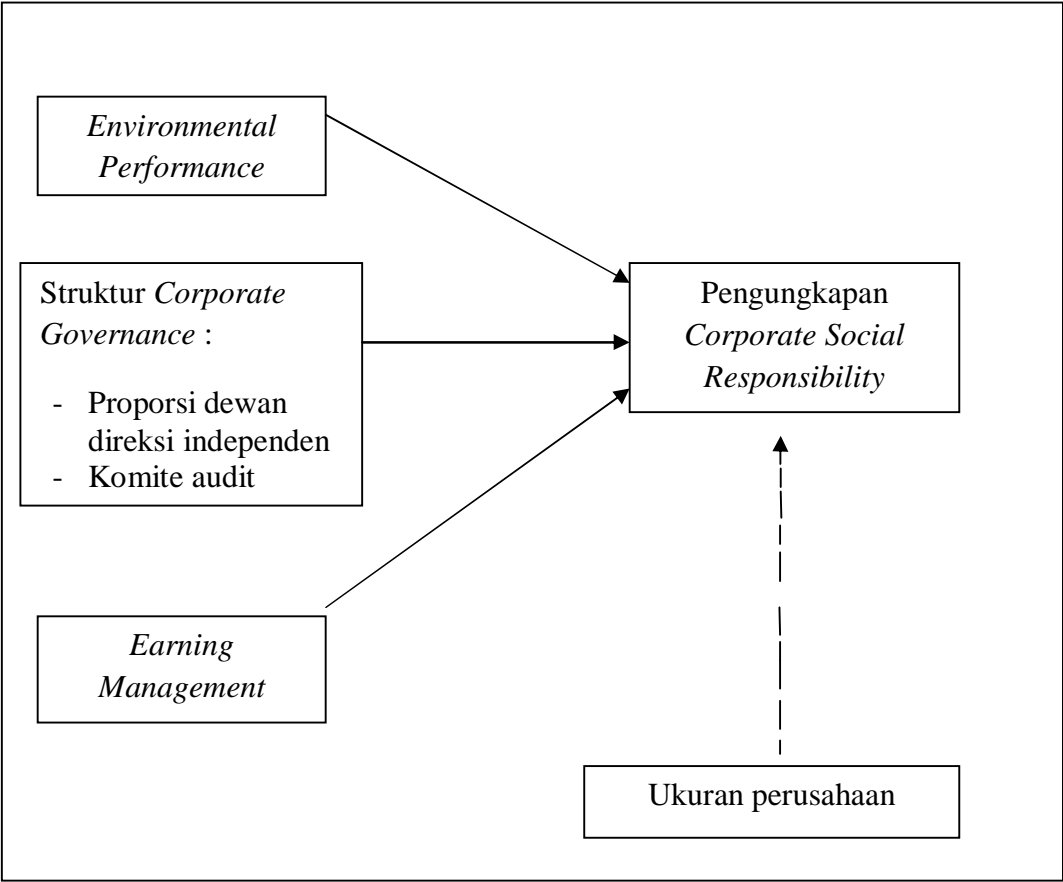
<p>Anggraini (2006)</p>	<p>Memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan</p>	<p>kepemilikan manajemen, tipe industri, leverage, <i>size</i>, dan profitabilitas</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel prosentase kepemilikan manajemen dan tipe industri yang terbukti mempunyai hubungan positif signifikan.</p>
<p>Novita dan Djakman (2008)</p>	<p>Memberikan bukti empiris struktur kepemilikan (kepemilikan asing dan kepemilikan institusional) dengan variabel kontrol tipe industri, ukuran perusahaan,</p>	<p>Kepemilikan asing, kepemilikan institusional, tipe industri, ukuran perusahaan</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial</p>

	<p>dan kategori BUMN-Non BUMN terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.</p>		
Handajani dkk (2008)	<p>Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh <i>earning management</i> dan struktur <i>corporate governance</i> terhadap pengungkapan CSR</p>	<p><i>Earning management</i>, struktur <i>corporate governance</i>, CSR <i>disclosure</i>, profil perusahaan, tipe industri, <i>leverage</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara <i>earning management</i>, komite audit sebagai proksi <i>corporate governance</i>, profil perusahaan, dan tipe industri terhadap <i>CSR disclosure</i>.</p>

Nurkhin (2009)	Memberikan bukti empiris pengaruh <i>corporate governance</i> dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR	<i>Corporate governance</i> , profitabilitas, laporan CSR, ukuran perusahaan, tipe industri	Komposisi dewan komisaris independen sbg proksi <i>corporate governance</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap laporan CSR.
Rakhiemah dan Agustia (2009)	Memberikan bukti empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap <i>CSR disclosure</i> dan kinerja finansial	Kinerja lingkungan, <i>CSR disclosure</i> , kinerja <i>financial</i>	Hasil menunjukkan bahwa hanya kinerja lingkungan yang berpengaruh positif terhadap <i>CSR disclosure</i> dan pengungkapan CSR dapat menjadi variabel intervening antara kinerja

			lingkungan dengan kinerja finansial.
--	--	--	--------------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 *Environmental Performance* dengan Pengungkapan CSR

. Kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno dkk (2006) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Kinerja lingkungan dipengaruhi oleh seberapa besar motivasi perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga akan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Semakin baik kinerja lingkungan perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya maka semakin besar pula pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Dengan adanya tindakan proaktif perusahaan dalam pengelolaan lingkungan serta adanya kinerja yang tinggi, manajemen perusahaan diharapkan akan terdorong untuk mengungkapkan tindakan manajemen lingkungan tersebut dalam *annual report* (Berry dan Rondinelle, 1998 dalam Ja'far dan Arifah, 2006). Hal tersebut menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik sehingga masyarakat dapat mengetahui peran perusahaan terhadap lingkungannya.

Verrecchia (1983) dalam Suratno dkk. (2006) dengan teorinya *discretionary disclosure* mengatakan pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan *performance* mereka berarti menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar. Oleh sebab itu, perusahaan dengan *environmental performance* yang baik perlu mengungkapkan informasi kinerja lingkungannya pada laporan tahunan perusahaan. Semakin perusahaan menaikkan kualitas kinerjanya terhadap lingkungan dan

kemudian mengungkapkan kinerjanya tersebut ke dalam laporan tahunannya, akan semakin baik pula perusahaan di mata para investor maupun masyarakat (Handayani, 2010). Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara kinerja lingkungan (*environmental performance*) dengan pengungkapan CSR. Hasil penelitian Rakhiemah dan Agustia (2009) menunjukkan adanya pengaruh positif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan CSR.

H1 : *Environmental performance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.4.2 Struktur *Corporate Governance* dengan Pengungkapan CSR

Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya (Trisnaningsih, 2007). Pada prinsipnya tujuan *Corporate Governance* adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut memerlukan akuntabilitas perusahaan dalam bentuk pengungkapan termasuk di dalamnya adalah pengungkapan sosial.

Penerapan *corporate governance* pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk lebih menitikberatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* merupakan suatu sistem yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Nurkhin (2009) *corporate governance*

merupakan sistem yang dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR-nya. Struktur *Corporate Governance*, diukur dengan :

1. Proporsi dewan komisaris independen
2. Jumlah komite audit

2.4.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan pihak internal perusahaan yang memiliki wewenang terhadap pengawasan aktivitas perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen di dalam perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan aktivitas perusahaan termasuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ahmad Nurkhin (2009) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktik dan pengungkapan CSR. Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif.

Keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia diatur dengan Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Berdasarkan aturan tersebut, jumlah dewan komisaris independen minimal adalah 30%. Komisaris independen bertujuan untuk meningkatkan

independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan segalanya (Muntoro, 2006 dalam Waryanto, 2010). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara komisaris independen dengan pengungkapan CSR. Penelitian oleh Huafang dan Jianguo (2007) dan Nurkhin (2009) menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Semakin besar komposisi dewan komisaris independen akan berdampak pada keputusan dewan komisaris dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan akan lebih objektif dalam menerapkan *corporate governance* yang salah satunya melalui pengungkapan sosial. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bai dkk (2003) dalam Yuen (2009), struktur *governance* yang baik dapat dibentuk oleh dewan independen melalui pengungkapan transparan dan lingkungan hukum yang efektif akan mengurangi kecenderungan perilaku disfungsional pemegang saham pengendali.

Menurut Haniffa dan Cooke (2002), apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Dengan kata lain, komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu

melindungi seluruh *stakeholder* perusahaan sehingga hal ini dapat mendorong pengungkapan *Corporate Social Responsibility* lebih luas.

H2 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.4.2.2 Jumlah Dewan Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-103/MBU/2002, pengertian komite audit adalah suatu badan yang berada di bawah komisaris yang beranggotakan minimal satu orang anggota komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan anggota BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.

Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan yang dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas

pengawasan termasuk praktik dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian oleh Handajani dkk (2008); Bliss dan Balachandran (2003), dalam Said dkk (2009), menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan CSR.

Komite audit yang diprosikan dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dapat semakin meningkatkan aktivitas pengawasan atau monitoring yang lebih baik sehingga aktivitas pengawasan ini diharapkan dapat memperluas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholders* dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena jumlah komite audit memberikan pengendalian dan pengawasan.

H3 : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.4.3 *Earning Management* dengan Pengungkapan CSR

Earning management atau manajemen laba dilakukan oleh pihak manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Manajemen melakukan praktik tersebut untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sehingga berdampak pada kompensasi tinggi yang akan diperoleh. Menurut Prior dkk (2008) dalam Handajani dkk (2008), metode untuk membuat para manajer melindungi posisi dan menjaga kepentingan mereka yaitu dengan melibatkan diri ke dalam aktivitas yang ditujukan

untuk membangun hubungan dengan stakeholder perusahaan dan aktivis lingkungan yang diketahui sebagai CSR. Dengan adanya praktik manajemen laba yang tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas laba perusahaan, pengungkapan CSR perlu dilakukan untuk tetap menjaga hubungan perusahaan dengan para *stakeholder*.

Argumen lain yang membenarkan penggunaan strategi CSR oleh manajer yang melakukan manajemen laba adalah terkait dengan perbaikan *image* perusahaan. Operasi kegiatan tanggung jawab sosial dianggap sebagai strategi pertahanan manajer untuk menghadapi tekanan dari *stakeholder* yang terkena dampak usaha sebagai hasil dari praktik manajemen laba. Manajer yang memiliki insentif untuk praktik manajemen laba akan sangat proaktif dalam mendukung perlindungan masyarakat dan *stakeholder* lain melalui aktivitas tanggung jawab sosial (Handajani dkk, 2008). Dengan demikian, semakin meningkatnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen akan semakin menurunkan kualitas laba perusahaan. Adanya penurunan kualitas laba perusahaan akan diatasi perusahaan dengan memperluas laporan tanggung jawab sosial perusahaan agar tetap memberikan *image* yang baik di kalangan *stakeholder*.

H4 : *Earning management* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian Analisis Pengaruh *Environmental Performance*, Struktur *Corporate Governance*, Dan *Earning Management* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menggunakan variabel dependen, independen dan variabel kontrol. Variabel independen terdiri dari *environmental performance* yang diukur dengan menggunakan PROPER, struktur *corporate governance* yang diukur dengan proporsi dewan direksi independen dan komite audit, sedangkan *earning management* diukur dengan *discretionary accrual*. Variabel dependen yaitu pengungkapan CSR. Variabel kontrol untuk penelitian ini adalah *size* perusahaan yang diukur dengan *log of total asset* perusahaan.

3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)

3.1.1.1 Pengungkapan CSR

Corporate Social Responsibility merupakan praktik bisnis transparan yang didasarkan pada nilai-nilai etika, dengan memberikan perhatian pada karyawan, masyarakat, dan lingkungan, serta dirancang untuk melestarikan masyarakat secara umum dan juga para pemegang saham (Inawesnia, 2008). Pengungkapan CSR menurut Gray dkk (2001), dalam Rakhiemah dan Agustia (2009), didefinisikan

sebagai suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability* yang secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial. Pengungkapan CSR dalam penelitian ini adalah proksi menggunakan ICSR berdasarkan *Global Reporting Initiatives (GRI)* yang diperoleh dari www.globalreporting.org. Indikator GRI yang digunakan termasuk: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item). Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79. ICSR masing-masing perusahaan dihitung sebagai berikut :

$$\text{CSDI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Dimana:

CSDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

n_j : jumlah *item* untuk perusahaan j , $n_j = 79$

X_{ij} : 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, $0 < \text{CSDI}_j < 1$

3.1.2. Variabel Bebas (Independen)

3.1.2.1 *Environmental Performance*

Environmental Performance menurut Suratno dkk (2006) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Pengukuran kinerja lingkungan ini menggunakan peringkat kinerja PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sistem Peringkat Kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima (5) warna yakni :

1. Emas : Sangat sangat baik; skor = 5
2. Hijau : Sangat baik; skor = 4
3. Biru : Baik skor = 3
4. Merah : Buruk; skor = 2
5. Hitam : Sangat buruk skor = 1

Tabel 3.1
Kriteria Peringkat PROPER

No	Peringkat	Keterangan
1.	Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3 R (Reuse, Recycle, Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi

		kepentingan masyarakat jangka panjang.
2.	Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).
3.	Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
4.	Biru minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5.	Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6.	Merah minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang

		sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7.	Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Sumber : Laporan PROPER periode 2008 – 2009

3.1.2.2 Struktur *Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan :

1. Keberadaan komisaris independen, diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Komisaris independen =

$$\frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris independen}}$$

Jumlah seluruh anggota dewan komisaris independen

2. Komposisi komite audit, diukur dengan jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan

3.1.2.3 *Earning Management*

Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 1989 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Manajemen laba menggunakan proksi *discretionary accruals* dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model* (Dechow dkk, 1995 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

$$TAC = Nit - CFOit \dots \dots \dots (1)$$

Nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS sebagai berikut :

$$TAit/Ait-1 = \beta_1 (1 / Ait-1) + \beta_2 (\Delta Revt / Ait-1) + \beta_3 (PPEt / Ait-1) + e \dots \dots \dots (2)$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDA_{it} = \beta_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_t / A_{it-1} - \Delta Rect_t / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t / A_{it-1}) \dots \dots \dots (3)$$

Selanjutnya *discretionary accrual* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode ke t

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t

$\Delta Rect$ = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

e = error

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Size perusahaan

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan dengan asumsi bahwa perusahaan yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi perusahaan lebih luas. Ukuran perusahaan akan diukur dengan menggunakan *Log of Total Asset*.

3.2 Populasi dan Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan adalah perusahaan publik yang terdaftar dalam PROPER selama periode 2007 - 2009. Pemilihan sampel berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu (Nur dan Bambang, 2002).

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah:

1. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan tergabung dalam PROPER selama tahun 2007 - 2009.
2. Perusahaan tersebut menerbitkan *annual report* periode 2007 - 2009.
3. Perusahaan tersebut menyediakan informasi mengenai pelaksanaan CSR, proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data berupa *annual report* dan laporan keuangan perusahaan yang *go public* dan terdaftar dalam program PROPER selama tahun 2007-2009. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder pada periode 2007-2009. Data sekunder diperoleh dari BEI. Informasi mengenai komisaris independen dan komite audit diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data Laporan Keuangan dan *annual report* yang termasuk sampel diperoleh dari BEI. Data PROPER diperoleh dari *website* kementerian lingkungan hidup <http://www.menlh.go.id>

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didefinisikan sebagai metode dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain :frekuensi, tendensi sentral (*mean*, median, modus), *disperse* (standar deviasi dan varian) dan koefisien korelasi antara variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran *construct* yang digunakan yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2009). Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui jumlah indeks pengungkapan laporan CSR, jumlah kata yang berhubungan dengan pengungkapan CSR, dan fokus pengungkapan CSR.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotetis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan terdiri dari : uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multi kolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Antara variabel

bebas dikatakan tidak terjadi korelasi jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen dan memiliki nilai VIF kurang dari 10.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, berarti data tersebut berdistribusi normal.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam

suatu model penelitian dapat menggunakan Uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel penjelas.

Hipotesis yang diuji adalah:

Ho : tidak ada gejala autokorelasi positif pada model ($r = 0$)

Ha : ada gejala autokorelasi positif pada model ($r \neq 0$)

Keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2009) adalah:

1. $0 < d < dl$, artinya tidak ada autokorelasi positif, maka Ho ditolak
2. $dl \leq d \leq du$, artinya tidak ada autokorelasi positif, maka tidak terdapat keputusan.
3. $4-dl < d < 4$, tidak ada korelasi negatif, maka Ho ditolak.
4. $4-du \leq d \leq 4-dl$, tidak ada korelasi negatif, maka tidak terdapat keputusan .
5. $du < d < 4-du$, menerima Ho, artinya tidak terdapat autokorelasi, maka Ho diterima.

3.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis statistik regresi berganda, yang terdiri dari *Adjusted R square*, untuk melihat persentase pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian terhadap variabel dependen, uji F untuk menguji hipotesis antara lebih dari satu variabel independen terhadap satu

variabel dependen serta uji t untuk menguji hipotesis antara satu variabel independen dengan satu variabel independen.

3.5.4 Persamaan Regresi Linier Berganda

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *environmental performance*, struktur *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen dan komite audit, dan *earning management*. Penelitian ini juga menggunakan variable kontrol yaitu ukuran perusahaan. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ICSR_{it} = \beta_0 + \beta_1 EP_{it} + \beta_2 EM_{it} + \beta_3 KOM_{it} + \beta_5 AUDIT_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \epsilon$$

Dimana :

EP_{it} : *Environmental Performance*

$ICSR_{it}$: *CSR disclosure index of i company at the year of t*

EM_{it} : *Earning management of i company at the year of t*

KOM_{it} : *Composition of independent board director of i company at the year of t*

$AUDIT_{it}$: *Audit Committee of i company at the year of t*

$SIZE_{it}$: *Company Size of i company at the year of t*

ϵ_i : *error term*

Dimana:

- ICSR = ukuran *Corporate Social Responsibility* yang diukur dengan menggunakan CSDI berdasarkan GRI
- EP = ukuran *Environmental Performance* yang diukur menggunakan penilaian warna dalam PROPER
- EM = *Earning Management* yang diukur dengan *discretionary accrual*.
- KOM = persentase dewan komisaris independen dalam dewan komisaris
- AUDIT = komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit
- SIZE = ukuran perusahaan yang diukur dengan *Log of Total Asset*.

3.5.5 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Menurut Ghozali (2009), uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) 17. Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Kesimpulan hipotesis dilakukan berdasarkan *t-test*.

3.5.7 Uji signifikansi Simultan (Uji statistik F)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan digunakan uji f.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$$

Artinya tidak semua variabel independen berpengaruh secara simultan.

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4$$

Artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan.

Untuk menguji hipotesis ini, digunakan statistic F dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima ($\alpha = 5\%$)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_o diterima ($\alpha = 5\%$)